



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Endang Suryastuti, S.H., M.Si.
Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
Jabatan : Plt. Deputi Bidang Administrasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan bekerja keras untuk dapat mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
NIP. 19690213 199302 1 001

Jakarta, 8 Agustus 2025
Pihak Pertama,


Endang Suryastuti, S.H., M.Si.
NIP. 19690801 199403 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Program Penyelenggaran Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan DPR RI			
1.	Terlaksananya dukungan penanganan perkara hukum di dalam dan di luar pengadilan oleh Tim Kuasa DPR RI	1. Persentase capaian dukungan penanganan perkara hukum di dalam dan di luar pengadilan oleh Tim Kuasa DPR RI	100%
2.	Meningkatnya kualitas layanan manajemen internal di bidang hukum dan pengaduan masyarakat	1. Indeks kepuasan Anggota DPR RI dan pengguna lainnya atas kinerja layanan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat 2. Nilai jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH)	3,74 Sangat Baik (80,00)
B. Program Dukungan Manajemen			
3.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Reformasi Birokrasi di Bidang Hukum dan Pengaduan masyarakat	1. Tingkat Pengaduan masyarakat yang sudah ditindaklanjuti secara substantif	5

Program	Anggaran
Satker Dewan	Rp1.083.819.000,00
CF. Program Penyelenggaran Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan DPR RI	Rp1.083.819.000,00
Satker Setjen	Rp3.742.607.000,00
WA. Program Dukungan Manajemen	Rp3.742.607.000,00

Plt. Deputi Bidang Administrasi,

Jakarta, 8 Agustus 2025
Kepala Biro Hukum dan Pengaduan
Masyarakat,

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H.
NIP. 19690213 199302 1 001

Endang Survastuti, S.H., M.Si.
NIP. 19690801 199403 2 001

